

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merespon dinamika perubahan kebijakan terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini berisi rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya di bidang Penelitian dan Pengembangan sejalan dengan Visi, Misi Gubernur Jambi periode 2021-2026 dengan visi ***"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT"***.

Kami menyadari bahwa P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan P-Renstra ini akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, semoga P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Balitbangda Provinsi Jambi.

Jambi,

2024

Kepala Badan,



L. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660722 199303 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYAN UMUM	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya	35
2.3. Kinerja Pelayanan.....	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	56
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	61
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021-2026	56
3.3. Telaah Renstra K/L.....	71
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	78
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	82
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	85
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	85
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	89

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	94
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
BAB VIII	PENUTUP.....	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi per 31 Desember 2022	39
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi	41
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi	54
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH.....	67
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi.....	86
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategis Balitbangda Provinsi Jambi.....	90
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi.....	96
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi yang Mengacu pada Sasaran RPJMD.....	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Provinsi Jambi.....	30
Gambar 2.2. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural per 31 Desember 22023.....	36
Gambar 2.3. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2023	37
Gambar 2.4. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023	37
Gambar 2.5. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2023	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Lima Tahunan dan Rencana Kerja Setiap Tahun yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi yang disusun secara berurutan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis OPD hingga kepada Rencana Kerja OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur lebih detil yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan pemerintahan. Aturan tentang isi dan tata cara prosedur penyusunan mulai dari RPJP yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun, RPJM dengan durasi waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Tahunan Pemerintah yang diharapkan akan menunjukkan satu garis tegas keterkaitan dari setiap dokumen

perencanaan agar terjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra OPD disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Disamping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen

yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Fungsi dari Renstra OPD, yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi (Balitbangda) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dimana Balitbangda Provinsi Jambi melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, maka perlu dibuat Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”***.

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun terhitung Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini sebagai platform atas pelaksanaan visi dan misi Balitbangda Provinsi Jambi dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi periode 2021-2026. Dengan kata lain, Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi.

Selanjutnya sesuai pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Renstra dimaksud dapat dilakukan penyesuaian pada tahun berjalan sebagaimana ketentuan, yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renstra dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Pada tahun 2024, Balitbangda Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan Renstra 2021-2026. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen SAKIP Perangkat Daerah serta menindaklanjuti hasil reviu sementara terhadap penyusunan dokumen Critical Success Factor (CSF), Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, serta Crosscutting Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh Pembina SAKIP pada Kedeputian RB dan Akuntabilitas

Kinerja Kementerian PANRB, perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP Perangkat Daerah. Perubahan Renstra yang dilakukan antara lain mencakup penyelarasan Tujuan, Sasaran, ndikator Kinerja dan Target Kinerja PD, dengan mempedomani CSF, Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.

Proses penyusunan P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 melalui tahapan (1) persiapan (2) penyusunan Rancangan Awal Renstra (3) Rancangan Akhir Renstra dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan P-RPJMD sesuai dengan pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keterkaitan serta tahapan penyusunan P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1. berikut ini :

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Inobesia Nomor 5663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah :

1. menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Balitbangda Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi selama periode tahun 2021-2026 serta relevansi terhadap tuntutan kondisi yang didasarkan atas isu-isu strategis yang terjadi.

Tujuan disusunnya P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu :

1. menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2021–2026;
2. sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Jambi;
3. memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Jambi baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan;
4. membangun sistem kerja Balitbangda Provinsi Jambi yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok fungsi Balitbangda Provinsi Jambi; dan
5. memberikan dorongan moral bagi aparatur Balitbangda Provinsi Jambi guna meningkatkan komitmen kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang logis dan utuh tentang keseluruhan isinya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Balitbangda Provinsi

Jambi/susunan kepegawaian dan perlengkapan, kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**

Bab ini memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan renstra, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Jambi.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini Penutup, sebagai bagian akhir dari Dokumen P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balitbangda Provinsi Jambi merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tertanggal 27 Januari 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Balitbangda Provinsi Jambi dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di Pemerintahan Provinsi;
2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
3. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
4. pembinaan dan fasillitasi kelitbangan kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbangan kab/kota;
5. pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di provinsi;

7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintah provinsi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda;
9. memberikan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
10. permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing di daerah;
11. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi; dan
12. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanngaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
 - penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas dan keprotokolan;
 - penyiapan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;
 - pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan dan aset;
 - penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;

- pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
 - penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - pelaksanaan pemeliharaan aset; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya
- Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan data bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja badan dan dokumen perencanaan lainnya;
 - pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) badan;
 - penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
 - pengelolaan sistem informasi pelaporan pelaksanaan program kelitbangan di lingkungan badan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang , sosial budaya dan kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan terdiri dari :

- Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;

- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial budaya dan kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendil, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan evaluasi kebijakan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;

- pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai kewenangannya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Subbidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Ekonomi ; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di Penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyusunan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyusunan data dan bahan serta fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan Sumber Daya Genetik;
 - membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan, evaluasi, serta penyusunan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang sarana prasarana fisik dan wilayah, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan, komunikasi/informatika. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah mempunyai fungsi :
- mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi serta konsultasi di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KERJASAMA

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang Iptek dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa di bidang iptek dan kerjasama;

- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Iptek dan Kerjasama terdiri dari :

- Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penerapan teknologi;
 - penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta penerapan teknologi, meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pembinaan dan pelaksanaan kelitbangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi; aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,fasilitasi, evaluasi, perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pembinaan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Diseminasi dan Publikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan sosialisasi, promosi iptek ,diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Diseminasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang Diseminasi dan publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil

kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;

- pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi ;
- pelaksanaan pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG INOVASI DAERAH

Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;

- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Inovasi Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai fungsi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Sub Bidang Inovasi Produk Daerah, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode pengembangan Produk Daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Produk Daerah mempunyai fungsi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;

- menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
- melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing;
2. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala badan;
3. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu :

a. Jabatan Fungsional Peneliti

Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Peneliti, Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

b. Arsiparis

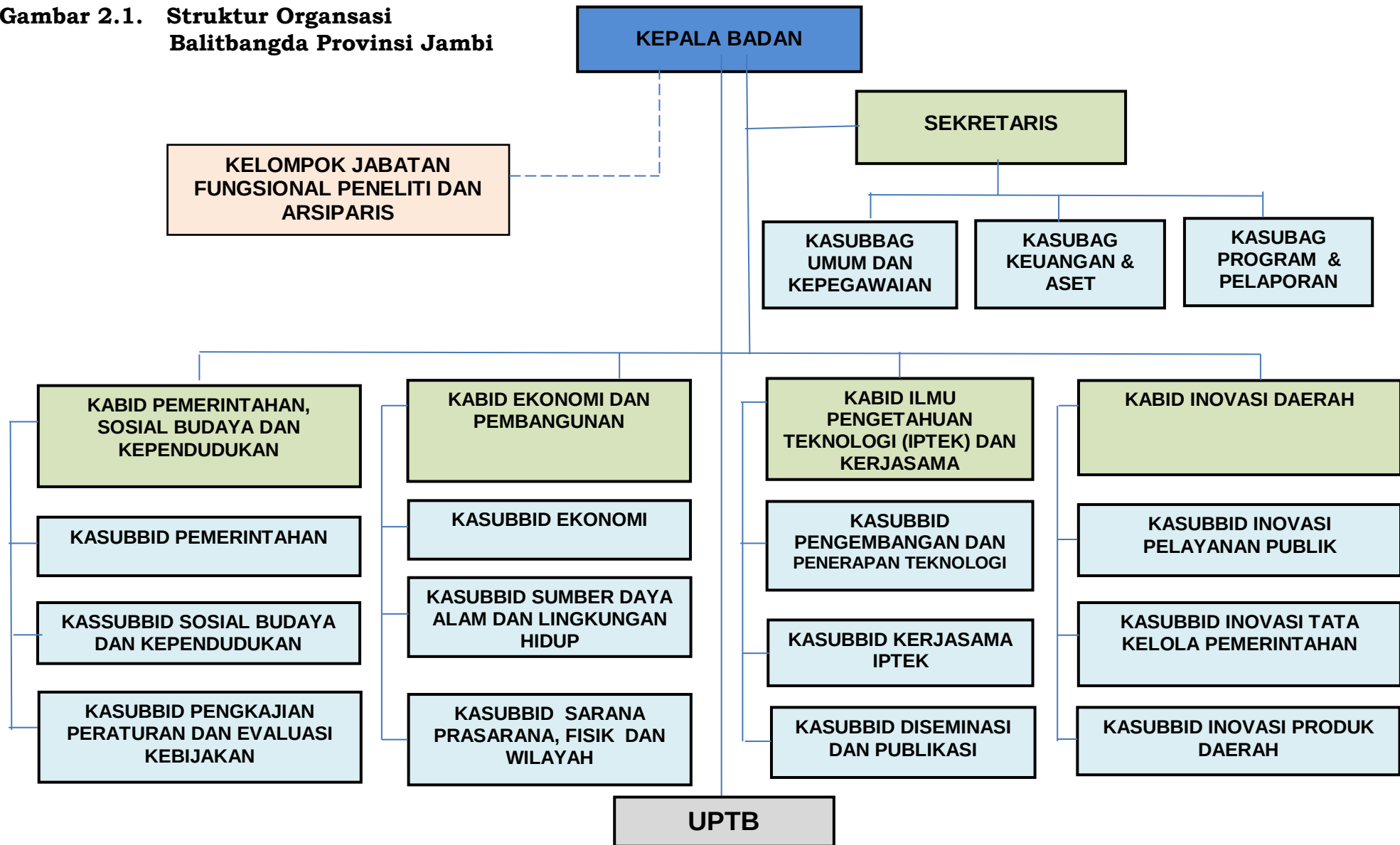
Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Keputusan Ketua Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Perguruan Tinggi Negeri. Pejabat Fungsional Arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Perguruan Tinggi Negeri.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukam, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II (Kepala Badan), 4 pejabat eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang) dan 15 pejabat eselon I (3 Kasubbag dan 12 Kasubbid) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar berikut :

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Balitbangda Provinsi Jambi**



2.1.1. Pengorganisasian Kelitbangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Balitbangda Provinsi Jambi didukung oleh pejabat struktural dan fungsional yang dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan juga didukung oleh:

- a. Majelis Pertimbangan (MP);
- b. Tim Pengendali Mutu (TPM); dan
- c. Tim Kelitbangan.

Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Gubernur (Ketua), Sekretaris Daerah Provinsi (Wakil Ketua), Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi (Anggota). Dalam hal tertentu selaku Majelis Pertimbangan, Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. MP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kelitbangan. Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- c. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP; dan
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan MP.

Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM bertugas untuk:

- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;

- c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Penanggung jawab), Sekretaris Badan Litbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Ketua), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi dan Pimpinan/Administrator pada Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Anggota). TPM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelitbangan.

Tim Kelitbangan (TK)

Tim Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim Kelitbangan meliputi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang:

1. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana bertugas untuk:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Balitbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Unsur Pelaksana beranggotakan:

- a. Pengarah, adalah Pejabat Fungsional Keahlian tingkat Madya atau Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator;
- b. Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang ditugaskan; dan
- c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas, Ahli/Pakar/Praktisi, dan tenaga lainnya.

2. Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertugas untuk:

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
- e. menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Balitbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Unsur Penunjang beranggotakan:

- a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat Administrator terkait;
- b. Sekretaris, adalah Pejabat Pengawas terkait;
- c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga lainnya.

2.1.2 Tata Laksana

Tata laksana kelitbangan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

a. Kelitbangan

Kelitbangan melalui tahapan:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pemantauan;
4. evaluasi; dan
5. pelaporan.

Kelitbangan itu sendiri terdiri atas:

a. Kelitbangan Utama, meliputi:

1. penelitian;
2. pengkajian;
3. pengembangan;
4. perekayasaan;
5. penerapan;
6. pengoperasian; dan
7. evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Kelitbangan Pendukung, antara lain melalui:

1. peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. penguatan ketatalaksanaan;
3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
4. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
5. fasilitasi inovasi daerah;
6. pengembangan basis data kelitbangan;
7. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
8. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

b. Kegiatan Penunjang

Dalam rangka mendukung kelitbangan diperlukan kegiatan penunjang, melalui:

1. Fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan diseminasi.
2. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
3. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan
4. Supervisi, dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
5. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

c. Rencana Kerja Kelitbangan

Balitbangda Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja Kelitbangan :

1. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

2. Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Kelitbangan disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:

- a. kebijakan dan program terkait;
- b. metode;
- c. waktu;
- d. lokasi;
- e. kelembagaan;
- f. sumber daya manusia aparatur;
- g. sarana prasarana;
- h. fasilitas pendukung; dan
- i. pembiayaan.

Rencana Kerja Kelitbangan disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan. Rencana induk kelitbangan wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD.

2.2. SUMBER DAYA

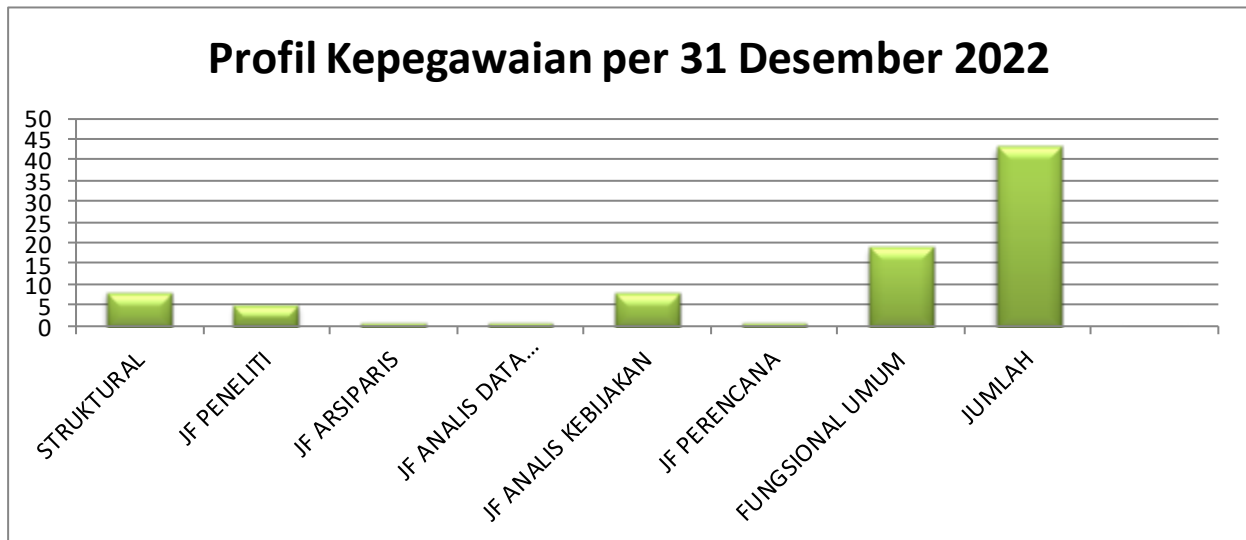
a. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yang terdiri 10 (delapan) orang pejabat struktural, 15 (lima belas)

pejabat fungsional tertentu, dan 19 (sembilan belas) orang pejabat fungsional umum serta 18 (delapan belas) orang PTT.

Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi disajikan dalam Grafik berikut :

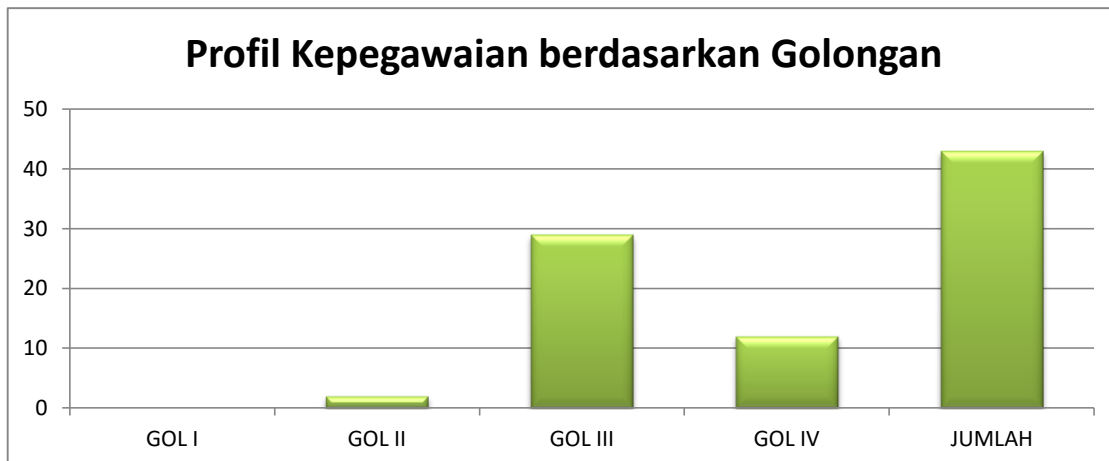
Gambar 2.2. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi per 31 Desember Tahun 2023



Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Balitbangda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional tertentu dimana sebagian besar pegawai masih menduduki jabatan fungsional umum. Penambahan jabatan fungsional Analis Data Ilmiah sangat diperlukan agar dapat memberikan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi secara maksimal.

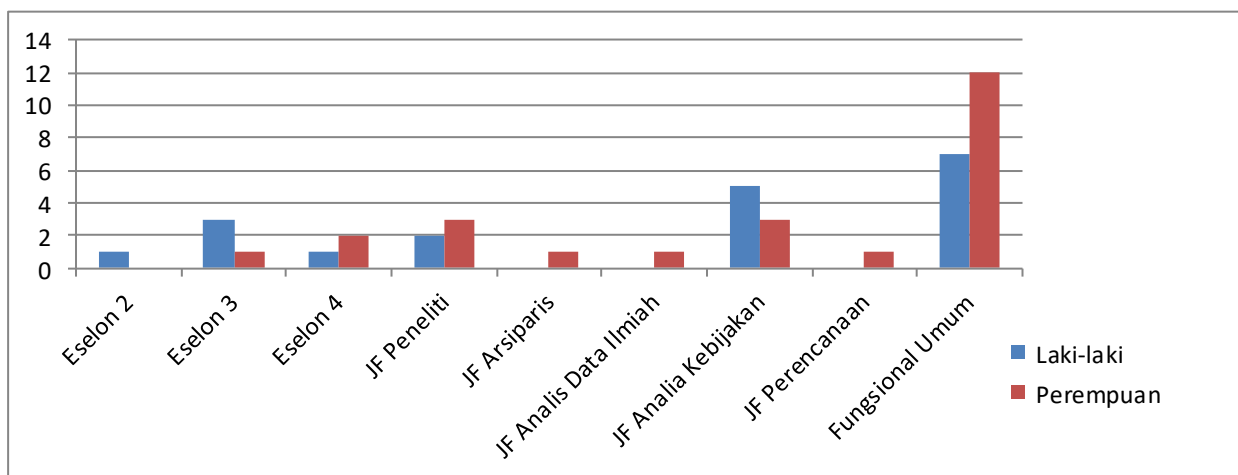
Gambar 2.3. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan per 31 Desember Tahun 2023



Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di Balitbangda Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III. Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2023



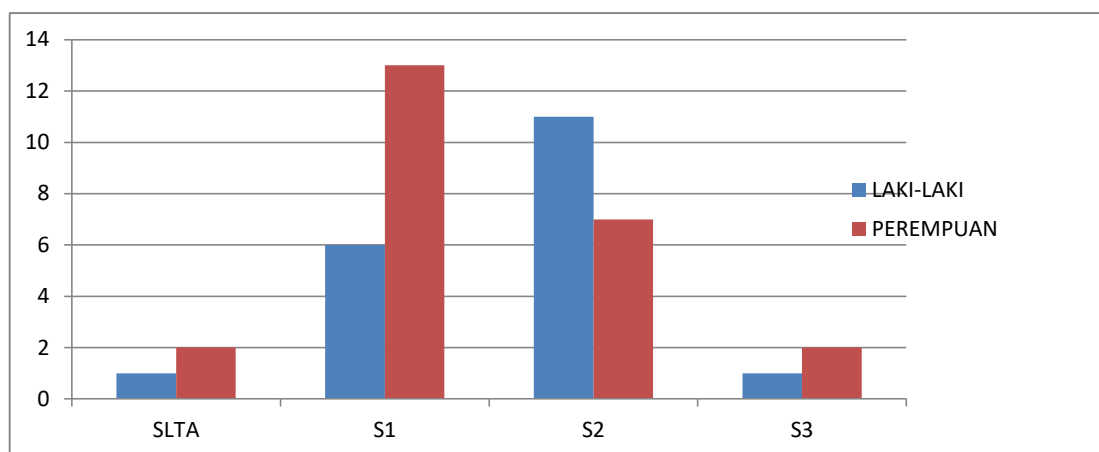
Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Balitbangda Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender, dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon),

fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya lebih banyak perempuan.

Profil kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi dasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5. Diagram Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember Tahun 2023



Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Balitbangda Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S2.

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruangrapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Balitbangda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana
Balitbangda Provinsi Jambi per 31 Desember Tahun 2023**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	-	
2	Alat-alat angkutan	26 Unit	
	- Kendaraan Roda 4	10 Unit	Baik
	- Kendaraan Roda 2	16 Unit	2 Rusak Berat
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.076 Jenis	20 Rusak Berat
4	Alat studio dan alat komunikasi	18 Jenis	1 Rusak Berat
5	Bangunan gedung	1 Unit	Baik
6	Jaringan	-	-
7	Buku perpustakaan	-	-
8	Alat-alat Kesehatan	2 jenis	Baik

Sumber : Balitbangda Daerah Provinsi Jambi, 2023

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Balitbangda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN

a. Capaian Kinerja Berdasarkan Target

Bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi pada periode renstra sebelumnya (2016-2021). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Balitbang pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari

pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Kegiatan yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Jambi pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>				30%	50%	50%	60%	60%	30%	50%	50%	60%	14,3 %	100	100	100	100	23,82
2	Persentase Peningkatan SIDA				80%	80%	80%	80%	100 %	80%	80%	80%	80%	0	100	100	100	100	0
3	Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan				0%	0%	0%	75%	75%	0%	0%	0%	75%	0	0	0	0	100	0
4	Science Park yang dikembangkan				1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	100	100
5	Persentase publikasi hasil-hasil kelitbangan yang dapat diakses masyarakat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100

1. Capaian indikator Kinerja Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder

a. Tahun 2016 persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder dengan target 30 % tercapai 30%. Penelitian yang dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) penelitian, yang terdiri dari :

❖ 9 (sembilan) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing fungsional peneliti yang ada di Ballitbangda Provinsi Jambi, dengan judul sebagai berikut :

- ✓ Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi
- ✓ Efektifitas Program Dana Desa Dalam Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Muaro Jambi
- ✓ Model Kemitraan Budi Daya Ikan Air Tawar di Kabupaten Muaro Jambi
- ✓ Kajian Pemasaran dan Daya Saing Pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- ✓ Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tebo
- ✓ Pengembangan Cerita Rakyat Kambi sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal Bagi Sekolah Dasar
- ✓ Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- ✓ Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jambi
- ✓ Sinergitas antar Unsur dan Lembaga pada Pemerintahan Desa

❖ 2 (dua) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul :

- ✓ Kajian Strategis Pengentasan Kerawanan Pangan di Provinsi Jambi
- ✓ Kajian Strategis Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Jambi

❖ 8 (delapan) penelitian yang dilakukan oleh bidang-bidang dengan judul sebagai berikut :

- ✓ Penelitian Kinerja Puskesmas dalam Implementasi BPJS di Provinsi Jambi.
- ✓ Penelitian Pola Hubungan Lintas Bidang dalam Pembangunan Perdesaaan di Provinsi Jambi
- ✓ Penelitian Potensi Energi Baru dan Terbarukan Di Provinsi Jambi.
- ✓ Penelitian Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jambi
- ✓ Penelitian Pengembangan Daya Saing Produk Lokal di Provinsi Jambi
- ✓ Penelitian Pengembangan Industri Kreatif di Provinsi Jambi.
- ✓ Kajian Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan Bank Jambi di Provinsi Jambi.
- ✓ Penerapan Inovasi Teknologi Pengolahan Zat Pewarna Batik Alam Jambi.

b. Tahun 2017 persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder dengan target 50 % tercapai 50%. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2017 ada 34 (tiga puluh empat) penelitian yang terdiri dari :

❖ 10 (sepuluh) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing fungsional peneliti yang ada di Ballitbangda Provinsi Jambi, dengan judul sebagai berikut :

- ✓ Kajian Perkembangan Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Penduduk Di Provinsi Jambi
- ✓ Strategi Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan Di Provinsi Jambi
- ✓ Persepsi Aparatur Sipil Negara Mengenai Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi
- ✓ Budaya Kerja Dan Kinerja PNS Provinsi Jambi Ditinjau Dari *Big Five* Personality dan Budaya Organisasi
- ✓ Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Serapan Tenaga Kerja lulusan SMK Di Provinsi Jambi Dengan *Metode Delphy*

- ✓ Pola Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang
- ✓ Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Pengrajin Batik Di Provinsi Jambi
- ✓ Kerjasama Multi Pihak Dalam program Pembangunan PLTMH Di provinsi Jambi ditinjau dari Perspektif *Collaborative Governance*
- ✓ Peranan Niniek Mamak Dalam Pemerintahan Adat Di desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci
- ✓ Faktor Yang Berpengaruh Pada Kepuasan Kerja Petugas Puskesmas Di Kabupaten Merangin
- ❖ 1 (satu) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul Kajian Klasterisasi Industri Hilir Produk Olahan Berbahan Baku Karet Di Provinsi Jambi
- ❖ 12 (dua belas) penelitian yang dilakukan oleh bidang-bidang dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ Kajian Pelayanan Pemerintah Kab/Kota Terhadap Masyarakat Di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
 - ✓ Kajian Pengembangan Desa Inovasi Dan Mandiri Dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Di Provinsi Jambi.
 - ✓ Kajian Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - ✓ Penelitian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anemia Pada Remaja Putri dan Program Penanggulangannya di Provinsi Jambi.
 - ✓ Penelitian Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan Serta Tenaga Pendidik Di Provinsi Jambi. Penelitian Kualitas Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi.
 - ✓ Penelitian Pembentukan Karakter Anak Menuju Generasi Muda Berkualitas di Provinsi Jambi.
 - ✓ Kajian Potensi dan Peningkatan Mutu Komoditi Unggulan Provinsi Jambi.
 - ✓ Kajian Peningkatan Status PT. PLN (Persero) Area Jambi Menjadi PT. PLN (Persero) Jambi.

- ✓ Penelitian Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Provinsi Jambi (Kajian Reklamasi Bekas Galian Tambang Batubara Sebagai Lokasi Wisata di Kabupaten Bungo).
 - ✓ Penelitian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ketahanan Pangan (Strategi Pengembangan Distribusi Beras Lokal Berlabel Di Provinsi Jambi).
 - ✓ Kajian dan Evaluasi Kualitas Bibit Sawit Di Provinsi Jambi.
- b. Tahun 2018 mencapai 50% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan.
- Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 ada 34 (tiga puluh empat) penelitian yang terdiri dari :
- ❖ 9 (sembilan) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing fungsional peneliti yang ada di Ballitbangda Provinsi Jambi, dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ Efektivitas Implementasi Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Menuju Sustainable Development Goals di Kabupaten Batanghari
 - ✓ Skenario Kebijakan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Batanghari (Alternatif Strategi Penataan Kawasan Orang Kayo Hitam Muaro Bulian)
 - ✓ Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara Online di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (Studi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Jambi dan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pamayung)
 - ✓ Keputusan Petani Berusaha Tani Jagung dengan menerapkan Teknologi Budidaya Jenuh Air (Studi kasus di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjab Timur)
 - ✓ Kajian Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Jambi
 - ✓ Pengaruh Pinjaman Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi kasus pada BAZNAS Provinsi Jambi)

- ✓ Model Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- ✓ Kinerja Pendamping Desa Dalam Pengawasan Dana Desa
- ✓ Kajian Komoditas Unggulan Subsektor Perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi
- ❖ 1 (satu) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul Analisis Pemasaran dan Branding Produk Makanan Jambi Menjadi Produk Makanan Nasional
- ❖ 9 (sembilan) penelitian yang dilakukan oleh bidang-bidang dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ *Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi*
 - ✓ *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Model Penerimaan Teknologi Aplikasi SISKEUDES di Provinsi Jambi)*
 - ✓ *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H. Hanafie Muaro Jambi*
 - ✓ *Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Jambi*
 - ✓ *Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia di Provinsi Jambi, Kajian Pelayanan Pemerintah Kab/Kota Terhadap Masyarakat Di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.*
 - ✓ *Pengembangan SMK Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Provinsi Jambi*
 - ✓ *Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Jambi,*
 - ✓ *Pengendalian Aktifitas PETI dan Pengembangan Inovasi Penataan Lahan Eks PETI*
 - ✓ *Model Inovasi Produk Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pendekatan Community Based Tourism di Provinsi Jambi*
- c. Target pada tahun 2019 sebesar 60% dengan capaian sebesar 60%. Adapun Penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Pemerintahan Desa dengan judul penelitian “Evaluasi Program Bantuan Keuangan Provinsi Terhadap Kebutuhan Pembangunan Pedesaan Di Provinsi Jambi”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan judul penelitian “*Determinan Stunting dan Model Pengendaliannya Di Provinsi Jambi (Studi Kasus pada Wilayah Dengan Prevalensi Kategori Berat)*”.
- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Sosial dan Kependudukan
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan judul “*Pengurangan Ketimpangan Pendapatan, Pendidikan dan Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi*”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Kependudukan dengan judul “*Determinan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Jambi*”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya adalah dengan judul “*Persistensi Pengangguran Terdidik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi*”.
- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi dengan judul kegiatan “Pengembangan Model Inovasi Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Institusi Multipihak”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dengan judul “Penelitian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya Di Kecamatan Dalam Provinsi Jambi
- ❖ 2 (dua) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri, dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ Kajian Pengembangan dan Investasi Agroindustri Kopi di Kabupaten Kerinci

- ✓ Diversifikasi Usahatani Kelapa Dalam untuk Meningkatkan Pendapatan Petani dan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - ❖ 1 (satu) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul Optimalisasi Potensi Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi
- d. Tahun 2020 realisasi hanya 14,3% dari target 60%, namun karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda yang baru dan musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang-bidang. Hampir semua kegiatan Penelitian dan Pengembangan dihapus yang masih berjalan hanya kegiatan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi, dengan judul *“Kajian Kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam Percepatan Penanganan Covid-19 secara Komprehensif”*.

2. Capaian indikator Kinerja Persentase Peningkatan SIDA

Pembangunan daerah perlu adanya peningkatan daya saing antar daerah sebagai agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini inovasi dan pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadi kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Terutama kolaborasi antara akademisi, swasta dan pemerintah. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

- a. Tahun 2016 Persentase Peningkatan SIDa dengan target 80 % tercapai 80%.
- b. Tahun 2017 Persentase Peningkatan SIDa dengan target 80 % tercapai 80%.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tahun 2017 yaitu melaksanakan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengolahan kopi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 9 Mei

2017 bertempat di Koperasi Tani Kayo Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, dengan peserta yang berasal dari Balitbangda Kota Sungai Penuh, Dinas Perkebunan Kota Sungai Penuh, Dinas Perdagangan Kota Sungai Penuh, Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh, Dinas Koperasi UMKM Kota Sungai Penuh, Penyuluh Pertanian Kota Sungai Penuh, Pengurus Koperasi Kayo Kota Sungai Penuh dan Petani Kopi Se-Kota Sungai Penuh. Pelatihan Penguatan dan Pengembangan SIDA yang difokuskan pada Hilirisasi produk olahan kopi adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang cara pengolahan dan pasca panen kopi dengan campuran kayu manis serta pemasaran hasil industri petani kopi. Sedangkan tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan petani kopi ke-depan dapat mengolah kopi dengan sebaik-baiknya mulai dari hulu sampai hilir dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani kopi.

- c. Tahun 2018 tercapai 80% atau 100% dari target yang telah ditentukan.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tahun 2018 yaitu melaksanakan workshop sistem inovasi daerah dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan sistem inovasi daerah, inovasi produk, jejaringan pemasaran, promosi dan networking. Tujuan dilaksanakan workshop adalah untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah, Perguruan Tinggi dan UKM serta mendorong pengembangan produk yang berdaya saing. Workshop Sistem Inovasi Daerah mengambil tema Dengan SIDA Kita Dorong Pengembangan Produk Unggulan Daerah Yang Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

- d. Tahun 2019 sebesar 80% dengan capaian sebesar 80%.

Kegiatan yang dilaksanakan penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan komoditi Nanas Tangkit dan Pinang. Penyusunan Roadmap bertujuan sebagai arah kebijakan Provinsi Jambi untuk mewujudkan “Masyarakat Sejahtera” dalam mendukung Pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri, mewujudkan masyarakat yang

berkemampuan dan berdaya saing yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat

e. Sementara tahun 2020 realisasi hanya 0% dari target 100%

Untuk indikator kinerja peningkatan SIDa diwujudkan dengan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan dilaksanakannya workshop/pelatihan sistem inovasi daerah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan sistem inovasi daerah, inovasi produk, jejaringan pemasaran, promosi dan *networking*. Namun karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda yang baru dan musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub bidang Inovasi Produk Daerah.

3. Capaian indikator Kinerja Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan

Indikator Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan merupakan indikator kinerja Balitbangda setelah ada perubahan indikator kinerja pada tahun 2019 sehingga Tahun 2016 s.d. 2018 Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan tidak ada. Target pada tahun 2019 sebesar 75% dengan capaian sebesar 75%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Lomba Inovasi Daerah pada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan menghitung Skor dari setiap isian data dukung inovasi daerah yang diinput oleh OPD melalui Aplikasi SIJAGOAN. Untuk OPD pemenang lomba tersebut diberikan insentif dan piagam penghargaan serta piala oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk Tahun 2019 lomba Inovasi daerah merupakan lomba yang pertama kali dilaksanakan dengan maksud untuk menggugah dan mendorong kepada semua OPD agar melakukan terobosan dalam berinovasi khususnya dalam melayani masyarakat. Sementara tahun 2020 realisasi hanya 0% dari target 75% hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 sehingga adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran dan juga adanya keterlambatan pengukuhan nomenklatur baru Balitbangda Provinsi Jambi

4. Capaian indikator Kinerja Science Park yang dikembangkan

Tahun 2016 Kinerja Science Park yang dikembangkan dengan target 1 tercapai masih 0 karena kegiatan Science Park yang dikembangkan baru menyusun *Master Plan* pembangunan *Science Park* Provinsi pada lahan seluas 25.723.914 Ha yang terletak di kawasan Bumi Perkemahan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Tahun 2017 Kinerja Science Park yang dikembangkan dengan target 1 tercapai masih 0, tahun 2017 diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 835.KEP.GUB/SET.PBMD.2.3/2017 tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungaim Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 9,7 Ha. Tahun 2018 tercapai 1 atau 100% dari target yang telah ditentukan. Tahun 2018 telah dilaksanakan pemasangan Papan Merk dan memasang patok yang telah ditetapkan agar lokasi pembangunan *Science Park* dapat terpelihara dan berkembang lebih baik. Tahun 2019 dengan capaian sebesar 100% dengan kegiatan pembersihan lahan (tebang tebas) tahap I *Science Park* Provinsi Jambi. Sementara tahun 2020 karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda yang baru dan musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Science Park di Provinsi Jambi sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam *Pengembangan Kawasan Science Park* adalah : 1. Tebatasnya dana, dimana untuk pembangunan kawasan *Science Park* ini sangat membutuhkan dana yang besar; dan 2. Belum adanya kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang ada di Provinsi Jambi.

5. Capaian indikator Kinerja Persentase Publikasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dapat diakses Masyarakat

- a. Tahun 2016 persentase Persentase publikasi hasil-hasil kelitbangan yang dapat diakses masyarakat dengan target 100 % tercapai 100%.

- b. Tahun 2017 persentase Persentase publikasi hasil-hasil kelitbang yang dapat diakses masyarakat dengan target 100% tercapai 100%. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan disebarluaskan kepada Bappeda, balitbangda Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Perpustakaan dan Pihak terkait lainnya. Jurnal Litbang (Jurnal Khazanah Intelektual) yang diterbitkan Balitbangda Provinsi Jambi tersebut disamping sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil kajian juga untuk memperoleh kredit point bagi penulis/tenaga fungsional baik di lingkungan Balitbangda maupun dari luar Balitbangda. Jurnal tersebut pada tahun 2018 diharapkan sudah bisa menggunakan system OJS (Operational Journal System) sehingga dapat mengakomodir para penulis ilmiah dari berbagai provinsi/kabupaten/kota.
- c. Tahun 2018 mencapai 100% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan tahun 2018 Jurnal sudah uji coba menggunakan system *Operational Journal System* (OJS).
- d. Target pada tahun 2019 sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan tahun 2019 Jurnal sudah menggunakan system *Operational Journal System* (OJS).
- e. Tahun 2020 realisasi 100% dari target 100%. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan sudah menggunakan system *Operational Journal System* (OJS) dan mempersiapkan jurnal Khazanah Balitbangda masuk Sinta 2.

b. Capaian Kinerja Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan dari segi Anggaran trendnya menurun seperti yang tergambar pada tabel 2.3 di bawah ini. Dilihat dari anggaran mengalami penurunan tahun 2017 dan 2018 dibandingkan tahun 2016. Tahun 2019 anggaran mengalami kenaikan dan menurun lagi di Tahun 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, sehingga anggaran

dilakukan refocusing untuk dana Covid-19. Capaian Kinerja Keuangan dari segi Realisasi Anggaran trendnya mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari rasio realisasi anggaran seperti yang tergambar pada table 2.3.

Rata-rata realisasi rasio realisasi kurang dari 100%. Tahun 2016 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 98,51% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki rasio sebesar 40,73%. Tahun 2017 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan sebesar 99,95% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki rasio sebesar 90,83%. Tahun 2018 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 99,17% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan memiliki rasio sebesar 64,43%. Tahun 2019 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah sebesar 99,26% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki rasio sebesar 93,75%. Tahun 2020 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan sebesar 100% serta rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Penelitian dan Pengembangan memiliki rasio sebesar 93,02%.

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuh- an	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga- ran	Real- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	819.209.720	845.928.400	828.784.300	810.379.800	891.952.147	757.949.559	789.140.757	808.472.439	798.745.044	868.457.827	92,52	93,29	97,55	98,56	97,37	2.27	3.52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	665.696.780	404.038.000	433.780.000	412.239.200	1.005.166.326	556.531.210	386.937.560	420.154.457	401.407.700	979.276.615	83,60	95,77	96,86	97,37	97,42	26.73	29.40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.800.000	45.000.000	45.000.000	52.000.000	46.150.000	26.400.000	43.875.000	44.625.000	48.750.000	46.150.000	98,51	97,50	99,17	93,75	100	18.05	17.95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000	42.000.000	49.090.000	55.760.000	21.522.800	26.472.000	38.150.000	48.085.055	54.071.200	2.800	40,73	90,83	97,95	96,97	100	-16.58	5.60
Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	0	50.080.500	18.081.000	6.600.000	0	0	50.053.000	11.650.000	6.420.000	0	#DIV/0!	99,95	64,43	97,27	#DIV/0!	-75.80	-73.87
Program Penelitian dan Pengembangan	1.616.885.100	2.191.719.256	1.736.490.750	1.992.654.650	537.208.000	1.524.133.959	2.046.917.608	1.673.985.148	1.945.673.243	499.721.000	94,26	93,39	96,40	97,64	93,02	-10.88	-10.50

Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	1.435.980.400	1.335.242.550	843.735.450	1.092.078.350	575.141.797	1.380.227.443	1.286.402.818	805.268.109	1.078.896.611	568.190.619	96,12	96,34	95,44	98,79	98,79	-15.43	-14.39
Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	835.223.000	228.308.249	582.107.500	578.288.000	81.829.000	658.328.350	218.455.325	573.508.174	574.644.250	81.225.200	78,82	95,68	98,52	99,37	99,26	-1.05	2.51
TOTAL	5.464.795.000	5.069.208.955	4.537.069.000	5.000.000.000	3.158.970.070	4.930.042.521	4.859.932.068	4.385.748.382	4.908.608.048	3.064.544.061	90,21	95,87	96,66	98,17	97,01	-11.09	-9.21

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan yang dilakukan Balitbangda Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jambi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kuantitas dan kualitas.

SDM di Balitbangda beranggapan Balitbangda sebagai batu loncatan/mencari peluang untuk memperoleh bantuan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan beralih ke jabatan struktural serta penempatan SDM belum sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*. Serta terbatasnya jumlah pejabat fungsional peneliti sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan.

3. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengembangan kelitbangan antar perangkat daerah

dan antar kelitbangan yang ada di Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten.

4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing sangat bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada berbagai dimensi dan tataran. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan melalui penguatan sistem inovasi. Rendahnya budaya Inovasi dikalangan masyarakat dan akademisi menjadi satu tantangan tersendiri bagi Provinsi Jambi dalam pengembangan pelayanan penelitian dan pengembangan.

5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam.

Keterbukaan telah mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) memaksa penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan. Sikap kritis masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan. Selain itu, tantangan yang berat dimana saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin lemah terutama dalam penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penegakan hukum, pelayanan publik dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

6. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil kelitbangan
Pengelolaan hasil-hasil kelitbangan perlu dikelola dengan baik sebagai data base yang terintergrasi dan menjadikan Balitbangda sebagai *resource center* atau bank data/informasi kelitbangan.

7. Peristiwa pandemi Covid-19 mengharuskan Balitbangda Provinsi Jambi agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan meningkatkan inovasi daerah.
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi digitalisasi yang berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sumber daya yang memadai baik anggaran maupun sumber daya manusia.
9. Belum kuatnya kerjasama kelitbangan dengan institusi litbang lainnya baik institusi litbang pemerintah atau swasta, dan perguruan tinggi terutama baik di tingkat nasional ataupun internasional
10. Tuntutan *stakeholders* terhadap kualitas hasil kelitbangan semakin meningkat dan harapan *stakeholders* terhadap Balitbangda mulai tinggi.
11. Data dan Jaringan Inovasi

Data dan jaringan inovasi merupakan bagian yang berperan sentral dalam upaya penguatan inovasi. Dikatakan demikian karena tanpa adanya data inovasi, penyaluran pengetahuan dan pengukuran kinerja penguatan inovasi yang dilakukan tidak akan bisa berjalan dengan baik, pun tanpa adanya jaringan inovasi, kolaborasi antar aktor akan menjadi susah untuk terjadi. Data dan jaringan inovasi merupakan dua hal saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Data inovasi yang dikelola dengan baik dapat berperan dalam mendorong lahirnya *sharing* pengetahuan dan terbentuknya jaringan antar pelaku inovasi. Oleh karena itu, akan lebih efektif apabila pengelolaan keduanya dilakukan secara terintegrasi.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD dan Balitbangda melaksanakan fungsi

penunjang di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. .

2. Adanya keinginan dan motivasi yang kuat dari segenap pimpinan dan pegawai Balitbangda Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna menjadikan litbang sebagai unit organisasi yang kredibel di bidangnya.
3. Tersedianya lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, balai-balai penelitian, lembaga-lembaga peneliti/jasa konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai permasalahan baik itu dibidang Pemerintahan, Politik, Kemasyarakatan, Kesehatan, Ekonomi dan Keuangan dll. Disatu sisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, tapi disisi lain ini menjadi peluang bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pengambil Kebijakan terhadap permasalahan yang ada.
5. Berdasarkan posisi strategis, pada prinsipnya Balitbangda Provinsi Jambi berperan pada bidang formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian kegiatan Kelitbangan Daerah merupakan ujung tombak formulasi dan evaluasi serta indikator untuk pedoman bangunan dan pengembangan daerah. Optimalisasi program/kegiatan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan sinkronisasi antara OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerjasama ini menempatkan Balitbangda Provinsi Jambi sebagai koordinator, mediator dan fasilitator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi arah kebijakan Pembangunan Daerah.
6. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan informasi sebagai sarana kemudahan akses terhadap data dan perkembangan media sosial sebagai sarana untuk mengkomunikasikan atau

mendiseminasikan hasil litbang, dan peningkatan jumlah pemanfaatan hasil litbang

7. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan pembangunan berbasis inovasi.
8. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BALITBANGDA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi tersebut, maka peran Balitbangda Provinsi Jambi sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi.

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.
4. Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah.

Pelayanan yang diberikan Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan tugas dan fungsi lebih banyak diarahkan untuk memberikan masukan yang berbentuk rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kegiatan kelitbangan yang akan diberikan kepada Kepala Daerah maupun PD lainnya sebagai penunjang penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah. Namun, selama ini pelayanan yang diberikan belum maksimal dan kurang tepat sasaran sehingga tidak banyak dimanfaatkan baik oleh Kepala Daerah maupun PD lainnya sebagai penyelenggara teknis operasional pemerintahan daerah.

Rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan tersebut sebenarnya tidak disebabkan oleh rendahnya kualitas hasil kelitbangan, melainkan oleh kegiatan kelitbangan yang kurang dapat merespon dengan baik kebutuhan dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak dapat dijadikan referensi dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Peran penting Balitbangda sebagai penyelenggara penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi untuk menjalankan tugas pokok tersebut adalah berkurangnya jumlah Peneliti dan kepakaran bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Salah satu acuan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi.

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan ketentuan di atas, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerinth Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat

menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatkan iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupam di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Misi pertama, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas yang mana sasaran adalah : a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Misi kedua, yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditi unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana sasaran strategis yang dilakukan adalah : a. memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan; b. meningkatkan industri pengolahan; c. meningkatkan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung pariwisata; d. memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar; e. Meningkatnya kualitas lingkungan; f. Menurunnya tingkat pengangguran; dan g. Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Misi ketiga, yaitu : memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya, agamis dan berkesetaraan gender yang mana sasaran strategis adalah : a. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. meningkatnya akses terhadap pendidikan; c. meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; d. meningkatnya toleransi intra dan antar agama; dan e. meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Dari Visi dan Misi Jambi MANTAP yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang, bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Provinsi Jambi,

Balitbangda turut bertanggungjawab dalam mewujudkan ketiga misi pembangunan tersebut. Misi yang terkait dengan tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi adalah Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Disamping itu, eksistensi Balitbangda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya ketiga misi Gubernur.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

Permasalahan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorongnya atas pelaksanaan program pembangunan daerah dijelaskan pada tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (MANTAP)				
Misi Pertama : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan				
Program :				
1.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	- Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Balitbangda dengan nilai “B”.	a. Belum adanya pedoman penerapan SAKIP Perangkat Daerah yang disusun oleh Instansi terkait b. LKj Balitbangda Provinsi Jambi belum disajikan informatif dan baik sesuai ketentuan. c. LKj Balitbangda Provinsi Jambi belum sepenuhnya memberikan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja yang riil secara memadai serta belum menyajikan perbandingan capaian kinerja pada tahun-	a. Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki sistem manajemen aplikasi e-SAKIP yang memadai. b. Adanya pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah

			tahun sebelumnya sesuai rentang Renstra. d. Penetapan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria yang baik (SMART). e. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum dilakukan secara periodik.	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dan pengembangan dengan kata lain Penelitian dan pengembangan belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah	a. Terbatasnya kepakaran fungsional peneliti b. Penentuan tema penelitian yang kurang up date c. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program	a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi b. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai

				permasalahan baik itu dibidang Pemerintahan, Politik, Kemasayarakatan, Kesehatan, Ekonomi dan Keuangan dll. Disatu sisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, tapi disisi lain ini menjadi peluang bagi Balitbangda untuk berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pengambil Kebijakan terhadap permasalahan yang ada.
--	--	--	--	---

3		Belum optimalnya kolaborasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan PTN/PTS, Badan Litbang Pusat maupun Kab/Kota maupun OPD terkait	a. Belum optimalnya program kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat	a. Tersedianya Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti/Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan
4		Belum optimalnya pemanfaatan budaya ekosistem inovasi di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah	a. Masih kurangnya pemahaman OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tentang Inovasi Daerah	b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah c. Adanya Pusat Jejaring Inovasi Daerah dari Kemendagri yang bertujuan mendorong inovasi pelayanan publik di Pemerintahan Daerah
5		Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah	a. Belum berkembangnya pemanfaatan Iptek untuk pembangunan daerah	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.3. TELAAH RENSTRA K/L

a. Visi Dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia-Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berubah nama mejadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri Dengan. BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BSKDN dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Meskipun BPP Kemendagri sudah berganti nama menjadi BSKDN namun dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri baru disahkan maka program kerja BSKDN masih menggunakan program kerja nomenklatur BPP Kemendagri. Perubahan nomenklatur BSKDN tersebut akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perubahan tugas dan fungsi serta perubahan substansi dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis (Restra), Recana Kerja (Renja), maupun Rencana Kerja

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Sampai saat penyusunan P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi disusun BSKDN masih menggunakan Renstra BPP Kemendagri 2020-2024.

Renstra BPP Kemendagri RI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Renstra BPP Kemendagri RI Tahun 2020-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2020-2024. Penyusunan Rencana strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, BPP Kemendagri mempunyai tugas “Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas yang diemban oleh BPP diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi tersusunnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, serta efektif dan efisien dalam penerapannya. Untuk itu, Visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yakni **“Menjadi Mitra Terpercaya dalam perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif dan Inovatif”**. Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan Visi : *“Kementerian dalam Negeri yang Adaptif, Profesional,*

Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintah dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

b. Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) awalnya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), namun dalam perjalanannya, pada 5 Mei 2021, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN.

Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN Pasal 3 BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring,

pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA. Sementara dalam pasal 4, BRIN menyelenggarakan 14 fungsi, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitas riset dan inovasi pemanfaatan riset dan inovasi;
4. Pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
5. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
6. Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan BERKELANJUTAN;
7. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

8. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
9. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
10. Pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
11. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
12. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
13. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Mempertimbangkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi :
“Terwujudnya Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang Andal, Professional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil

Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah :

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
2. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Adapun penjelasan misi BRIN tersebut dapat di uraian sebagai berikut

1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing.
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian

pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi berbagai permasalahan timbul. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pelayanan OPD, yaitu :

1. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya jumlah dan bidang kepakaran pejabat fungsional peneliti yang ada
- b. serta penempatan aparatur belum sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*.
- c. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
- d. Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah
- e. Masih terbatasnya jumlah hasil inovasi dan dukungan iptekin yang aplikatif guna mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan.

2. Faktor Pendorong

- a. Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) sebagai payung hukum pelaksanaan Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai

lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan inovasi.

- b. Komitmen Pemerintah Daerah sudah mulai tumbuh dalam mendukung penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi
- c. Sumber daya alam yang mendukung, yang harus dicari teknologinya, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut dan dapat berdaya saing dengan produk yang sama
- d. Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja
- e. Kerjasama dengan lintas sektoral : Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, OPD.
- f. Banyaknya permasalahan yang perlu diteliti/dikaji untuk masukan kebijakan daerah maupun permasalahan di masyarakat

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Jambi, agar terwujud ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Isu yang berkembang di wilayah Provinsi Jambi, yaitu :

- 1. Isu sistem dan jaringan perkotaan dimana banyak pihak yang menilai bahwa sistem transportasi di wilayah Provinsi Jambi masih dirasakan kurang memadai.
- 2. Isu pengembangan pantai timur yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
- 3. Isu adanya kawasan yang rawan bencana alam.
- 4. Isu terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan berupa tumpang tindih perizinan dan lain.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi Jambi, maka kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi :

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur (Strategi yang diambil adalah : 1. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan; 2. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer; 3. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL; dan 4. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan);
- b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah (Strategi yang diambil adalah : 1. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; 2. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan; 3. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; 4. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan 5. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.);
- c. pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah (Strategi yang diambil adalah : 1. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada; 2. mengembangkan

- dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; 3. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif; dan 4. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan);
- d. penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah (Strategi yang diambil adalah : 1. melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bungo untuk diarahkan menjadi PKNp; 3. melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRW Nasional; 4. meningkatkan dan menetapkan Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo dan Perkotaan Sengeti menjadi PKW yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan 5. menetapkan Perkotaan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wiroto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Nipah Panjang dan Pandan Jaya, menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan);
- e. penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan (Strategi yang diambil adalah : 1. meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari,

Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun; 2. mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi; dan 3. melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun); dan

- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara (Strategi yang diambil adalah : 1. mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah provinsi; 2. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan 3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS bertujuan untuk mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan ke dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) untuk pembangunan;
2. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
3. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kajian atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut serta telaahan Visi dan Misi Provinsi Jambi, maka berikut isu-isu strategis Balitbangda Provinsi Jambi :

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Keberadaan Balitbangda Provinsi Jambi, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah

2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek.

Keterbatasan SDM peneliti (baik kepakaran dan jumlah) Balitbangda Provinsi Jambi akan diatasi dengan mengembangkan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek. Sumber daya Iptek seperti lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta cukup banyak terdapat di Provinsi Jambi. Keberadaannya dapat dijadikan sebagai mitra dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek dan peningkatan kapabilitas Balitbangda Provinsi Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi merupakan salah satu PD dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari PD lain. Hubungan kerja antara Balitbangda Provinsi Jambi dengan PD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan penelitian dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral.

Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.
4. Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan predikat Nilai SAKIP Balitbangda Provinsi Jambi menjadi “BB”.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan penelitian pembangunan di daerah, terutama dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Balitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penelitian berkualitas dengan mengedepankan pendekatan penelitian partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas penelitian teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM penelitian, memantapkan kelembagaan penelitian serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitian pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitian pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitian pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pengembangan daerah.

5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016, bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”***, misi yang terkait dengan Urusan penunjang Pemerintahan Provinsi Jambi dalam bidang Penelitian dan Pengembangan adalah pada Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
					2022		2023	2024	2025	2026
					Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Renstra 2021-2026										
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	60%	100%	65%	70%	75%	80%
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	30%	30%	40%	45%	50%	50%
			Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah	59,50	-	60,00	60,50	61,00	61,50
				Persentase OPD kategori Inovatif	30%	-	35%	40%	50%	50%

			serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah	dan Sangat Inovatif						
				Persentase teknologi yang dikembangkan atau diimplementasikan stakeholder	80%	-	80%	80%	80%	80%
				Persentase Dokumen yang siap didaftarkan HKI-nya	80%	-	80%	80%	80%	80%
				Persentase Kerjasama yang terjalin	80%	-	80%	80%	80%	80%
Perubahan Renstra 2021-2026										
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi yang dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	-	-	-	69,90	69,95	69,99
			Meningkatnya kualitas hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	-	-	-	70%	72%	75%
				Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	60,00	60,25	60,50
			Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB (70,01)	BB (70,25)	BB (70,50)

Perubahan Renstra 2021-2026 Sesuai CSF										
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
					2022		2023	2024	2025	2026
					Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Pendayagunaan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi yang dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan	-	-	65%	70%	72%	75%
			Meningkatnya Penerapan Iptek dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	60,00	60,25	60,50
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	80,00	81,00	82,00
			Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB (70,01)	BB (70,25)	BB (70,50)

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi menunjukkan bagaimana cara Balitbangda Provinsi Jambi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi :

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
RENSTRA 2021-2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Peningkatan Kuliatas Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Melakukan konsultasi dengan OPD pembina dan pengawas Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi prioritas dan isu strategis 2. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas	1. Penyusunan RIK 2. Peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan perbaikan kualitas dan kemanfaatan output litbang 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penelitian dan pengembangan 4. Peningkatan kualitas dan sinergitas program penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kemanfaatan hasil 5. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan 6. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (problem solving) melalui pemanfaatan hasil Litbang

				7. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi public
		Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk mendukung daya saing daerah	1. Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Fasilitasi penguatan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi ke masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya KI/invensi 4. Pengembangan jejaring kemitraan antar institusi penelitian dan pengembangan	1. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi 2. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA 3. Penilaian pelaksanaan inovasi di OPD 4. Fasilitasi dan pembinaan inovasi OPD secara sinergi dan terpadu 5. Pemberian penghargaan dan penyediaan insentif bagi OPD inovatif 6. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi 7. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat 8. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan intelektual 9. Memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual 10. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya

RENSTRA 2021-2026 PERUBAHAN				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OPD pembina dan pengawas Perangkat Daerah 2. Mengikuti Bimtek SAKIP 3. Membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja) tepat waktu
		Meningkatnya kualitas hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan riset	1. Penyediaan hasil riset yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sosial dan Kependudukan; Ekonomi dan Pembangunan. 2. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah 3. Melakukan diseminasi dan difusi hasil riset
			1. Meningkatkan penguatan inovasi dan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan diseminasi, dan difusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Memfasilitasi pengembangan inovasi daerah dan penerapan teknologi 2. Fasilitasi dan pembinaan inovasi OPD secara sinergi dan terpadu 3. Melakukan diseminasi dan difusi inovasi dan teknologi

RENSTRA 2021-2026 PERUBAHAN SESUAI CSF				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pendayagunaan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan riset	1. Penyediaan <i>policy brief</i> berbasis hasil riset sesuai dengan kebutuhan daerah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sosial dan Kependudukan; Ekonomi dan Pembangunan; serta, Inovasi dan Teknologi. 2. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah 3. Melakukan diseminasi, difusi dan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ilmiah
		Meningkatnya Penerapan Iptek dan Inovasi Daerah	Meningkatkan diseminasi dan difusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Memfasilitasi pengembangan inovasi daerah dan penerapan teknologi 2. Fasilitasi dan pembinaan inovasi OPD secara sinergi dan terpadu 3. Melakukan diseminasi dan difusi inovasi dan teknologi
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Layanan Penunjang Pelayanan Publik Balitbangda Provinsi Jambi	1. Penyediaan pelayanan kesekretariatan Balitbangda Provinsi Jambi 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Balitbangda Provinsi Jambi	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OPD pembina dan pengawas Perangkat Daerah 2. Mengikuti Bimtek SAKIP 3. Membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja) tepat waktu

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
- d. Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelompok Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9												22	23	
PERUBAHAN RENSTRA 2021-2016																						
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI	Nilai AKIP		BB Predikat	BB Predikat	12,084,630,000	BB Predikat	12,295,500,000	69.9	13,663,750,000	69.95	14,592,000,000	69.99	14,990,250,000	69.99	67,626,130,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Balitbangda Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota dan Instansi Terkait	100%	100%	525,000,000	100%	590,000,000	100%	660,000,000	100%	730,000,000	100%	800,000,000	100%	3,305,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	JAMBI
				5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)		3	7	325,000,000	7	340,000,000	7	360,000,000	7	380,000,000	7	400,000,000	35	1,805,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)		7	8	90,000,000	8	95,000,000	8	100,000,000	8	105,000,000	8	110,000,000	40	500,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000		

				5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	8,985,000,000	100%	9,290,000,000	100%	9,625,000,000	100%	9,855,000,000	100%	10,085,000,000	100%	47,840,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		NA	50	8,900,000,000	55	9,200,000,000	60	9,400,000,000	65	9,600,000,000	70	9,800,000,000	300	46,900,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		NA	30	85,000,000	33	90,000,000	36	95,000,000	39	100,000,000	41	105,000,000	179	475,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		NA					3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	9	105,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		NA					3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	9	105,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dokumen)		NA					3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	9	105,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	76,000,000	100%	80,000,000	100%	165,000,000	100%	190,000,000	100%	215,000,000	100%	726,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	2	76,000,000	2	80,000,000	2	85,000,000	2	90,000,000	2	95,000,000	10	426,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.05	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	162,250,000	100%	185,500,000	100%	258,750,000	100%	292,000,000	100%	375,250,000	100%	1,273,750,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)		NA	1	42,250,000	1	45,500,000	1	48,750,000	1	52,000,000	1	55,250,000	5	243,750,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)							2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	6	90,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)							2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	6	90,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		8	12	120,000,000	14	140,000,000	16	160,000,000	20	180,000,000	25	250,000,000	87	850,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	785,000,000	100%	855,000,000	100%	975,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,125,000,000	100%	4,790,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	2	150,000,000	2	175,000,000	2	200,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	10	1,000,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		NA	2	45,000,000	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	2	65,000,000	10	275,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		NA	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	100,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)		50	40	420,000,000	45	440,000,000	50	460,000,000	55	480,000,000	60	500,000,000	250	2,300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)							12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	36	165,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)		NA	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	525,000,000	100%	130,000,000	100%	490,000,000	100%	825,000,000	100%	560,000,000	100%	2,530,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)		0	2	400,000,000	0	0	0	350,000,000	5	125,000,000	2	400,000,000	9	1,275,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)		1	1	0	1	0	1	0	1	3						
				5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	1	550,000,000	0	0	1	550,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	12	45,000,000	16	45,000,000	20	50,000,000	24	55,000,000	28	60,000,000	100	255,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	410,000,000	100%	485,000,000	100%	660,000,000	100%	735,000,000	100%	810,000,000	100%	3,100,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	12	40,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	60	250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	12	150,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	60	1,250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)						2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6	300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	2	220,000,000	2	240,000,000	2	260,000,000	2	280,000,000	2	300,000,000	10	1,300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	616,380,000	100%	680,000,000	100%	830,000,000	100%	915,000,000	100%	1,020,000,000	100%	4,061,380,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.01	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		23	20	305,380,000	23	310,000,000	23	315,000,000	24	320,000,000	29	350,000,000	119	1,600,380,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

					5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			0	4	136,000,000	4	140,000,000	4	145,000,000	4	155,000,000	5	160,000,000	21	736,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)							30	50,000,000	30	60,000,000	30	70,000,000	90	180,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
					5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)			30	30	25,000,000	30	30,000,000	30	35,000,000	30	40,000,000	30	45,000,000	150	175,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)			1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	5	1,250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)							30	35,000,000	30	40,000,000	30	45,000,000	90	120,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
		Meningkatnya Kualitas Hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Police Brief Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan Stakeholder	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Police Brief Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan Stakeholder			50%	60%	6,302,300,000	65%	7,548,750,000	70%	8,159,600,000	72%	8,170,070,000	75%	9,255,070,000	75%	39,435,790,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
						Indeks Inovasi Daerah				-	-	-	-	60.00		60.25		60.50		60.50				
					5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Police Brief Hasil Riset yang diaplikasikan Stakeholder pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat		50%	1	1580000000	1	1855000000	70%	2,447,500,000	72%	2,455,000,000	75%	2,785,000,000	75%	11,122,500,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah				0		0		3		4		4		11				
					5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)			0	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)			0	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000		
					5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)			-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)							1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	3	565,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)							1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	3	565,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)							1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	3	565,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		-	8	50,000,000	8	55,000,000	8	57,500,000	8	65,000,000	8	70,000,000	40	297,500,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		0	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		0	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)						5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	15	150,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Police Brief Hasil Riset yang diaplikasikan pada Stakeholder Bidang Sosial dan Kependudukan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1,660,000,000	65%	1,980,000,000	70%	1,985,000,000	72%	1,980,000,000	75%	2,255,000,000	75%	9,860,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Naskah Jurnal Bidang Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah			0		0		3		4		4		11			
				5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	900,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

					5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan pada <i>Stakeholder</i> Bidang Ekonomi dan Pembangunan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, <i>Stakeholder</i> dan Masyarakat	50%	60%	1,885,000,000	65%	2,340,000,000	70%	2,340,000,000	72%	2,340,000,000	75%	2,665,000,000	75%	11,570,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
							Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah			0		0	3		4		4		11				
					5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		-	1	200,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	945,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		-	1	15,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	760,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

						5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
						5.05.02.1.03.11	Penelitian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
						5.05.02.1.03.12	Penelitian Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
						5.05.02.1.03.13	Penelitian Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
						5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Jumlah Naskah Jurnal Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Jumlah Dokumen yang didaftarkan HKI-nya	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	NA	60%	1,177,300,000	65%	1,373,750,000	70%	1,387,100,000	72%	1,395,070,000	75%	1,550,070,000	75%	6,883,290,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
											0		0	77		82		89		248				
											0		0	2		2		2		6				
											0		0	6		8		10		24				
						5.05.02.1.04.01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	2	200,000,000	2	250,000,000	1	253,000,000	1	254,500,000	1	310,000,000	7	1,267,500,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		0	5	400,000,000	5	410,000,000	5	415,000,000	5	416,570,000	5	450,000,000	25	2,091,570,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		0	3	250,000,000	3	289,575,000	3	290,000,000	3	291,500,000	3	300,070,000	15	1,421,145,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan (Laporan)		3	3	227,300,000	3	277,000,000	3	279,100,000	3	280,000,000	3	320,000,000	15	1,383,400,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0	1	100,000,000	1	147,175,000	1	150,000,000	1	152,500,000	1	170,000,000	5	719,675,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
							J U M L A H					18,386,930,000		19,844,250,000		21,823,350,000		22,762,070,000		24,245,320,000		107,061,920,000		
						Kode	Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Data											Unit Kerja	Lokasi		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	22	23
PERUBAHAN RENSTRA 2021-2016 SESUAI CSF																						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas	Predikat Akuntabilitas Kinerja	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP		BB Predikat	BB Predikat	12,084,630,000	BB Predikat	12,295,500,000	BB (70,01)	13,663,750,000	BB (70,25)	14,592,000,000	BB (70,50)	14,990,250,000	BB (70,50)	67,626,130,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							80		81		82		82			
				5.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balitbangda Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota dan Instansi Terkait	100%	100%	525,000,000	100%	590,000,000	100%	660,000,000	100%	730,000,000	100%	800,000,000	100%	3,305,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	JAMBI
				5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)		3	7	325,000,000	7	340,000,000	7	360,000,000	7	380,000,000	7	400,000,000	35	1,805,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		7	8	90,000,000	8	95,000,000	8	100,000,000	8	105,000,000	8	110,000,000	40	500,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000		
				5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	8,985,000,000	100%	9,290,000,000	100%	9,625,000,000	100%	9,855,000,000	100%	10,085,000,000	100%	47,840,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		NA	50	8,900,000,000	55	9,200,000,000	60	9,400,000,000	65	9,600,000,000	70	9,800,000,000	300	46,900,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		NA	30	85,000,000	33	90,000,000	36	95,000,000	39	100,000,000	41	105,000,000	179	475,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Pelaksana dan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		NA					3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	9	105,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		NA					3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	9	105,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan Lanjut Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)		NA					3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	9	105,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	76,000,000	100%	80,000,000	100%	165,000,000	100%	190,000,000	100%	215,000,000	100%	726,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		NA					2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	6	75,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	2	76,000,000	2	80,000,000	2	85,000,000	2	90,000,000	2	95,000,000	10	426,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	162,250,000	100%	185,500,000	100%	258,750,000	100%	292,000,000	100%	375,250,000	100%	1,273,750,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)		NA	1	42,250,000	1	45,500,000	1	48,750,000	1	52,000,000	1	55,250,000	5	243,750,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)							2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	6	90,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)					2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	6	90,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
				5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	12	120,000,000	14	140,000,000	16	160,000,000	20	180,000,000	25	250,000,000	87	850,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	785,000,000	100%	855,000,000	100%	975,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,125,000,000	100%	4,790,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	NA	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	NA	2	150,000,000	2	175,000,000	2	200,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	10	1,000,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	NA	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	NA	2	45,000,000	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	2	65,000,000	10	275,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	NA	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	100,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	50	40	420,000,000	45	440,000,000	50	460,000,000	55	480,000,000	60	500,000,000	250	2,300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)						12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	36	165,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	NA	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	525,000,000	100%	130,000,000	100%	490,000,000	100%	825,000,000	100%	560,000,000	100%	2,530,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit berdasarkan pada 2)	0	2	400,000,000	0		0	350,000,000	5	125,000,000	2	400,000,000	9	1,275,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	1		0		1		0		1		3			
			5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	1	550,000,000	0	0	1	550,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	12	45,000,000	16	45,000,000	20	50,000,000	24	55,000,000	28	60,000,000	100	255,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	410,000,000	100%	485,000,000	100%	660,000,000	100%	735,000,000	100%	810,000,000	100%	3,100,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	12	40,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	60	250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	12	150,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	60	1,250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6	300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	2	220,000,000	2	240,000,000	2	260,000,000	2	280,000,000	2	300,000,000	10	1,300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	616,380,000	100%	680,000,000	100%	830,000,000	100%	915,000,000	100%	1,020,000,000	100%	4,061,380,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		23	20	305,380,000	23	310,000,000	23	315,000,000	24	320,000,000	29	350,000,000	119	1,600,380,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0	4	136,000,000	4	140,000,000	4	145,000,000	4	155,000,000	5	160,000,000	21	736,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)							30	50,000,000	30	60,000,000	30	70,000,000	90	180,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		30	30	25,000,000	30	30,000,000	30	35,000,000	30	40,000,000	30	45,000,000	150	175,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
			5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	5	1,250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)						30	35,000,000	30	40,000,000	30	45,000,000	90	120,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI		
Terwujudnya Pendayagunaan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi yang dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan		50%	60%	6,302,300,000	65%	7,548,750,000	70%	8,159,600,000	72%	8,170,070,000	75%	9,255,070,000	75%	39,435,790,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
			Meningkatnya Penerapan Iptek dan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah			-		-	60.00		60.25		60.50		60.50				
				5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan Stakeholder pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	1	1580000000	1	1855000000	70%	2,447,500,000	72%	2,455,000,000	75%	2,785,000,000	75%	11,122,500,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Artikel yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			0		0	3		4		4		11				
				5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)		0	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		0	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000		
				5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	

					5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)			-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
					5.05.02.1.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)							1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	3	565,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
					5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)			-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
					5.05.02.1.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)							1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	3	565,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
					5.05.02.1.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)							1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	3	565,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
					5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)			-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
					5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)			-	8	50,000,000	8	55,000,000	8	57,500,000	8	65,000,000	8	70,000,000	40	297,500,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)			0	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
					5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)			0	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI			
					5.05.02.1.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)							5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	15	150,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		

				5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan Stakeholder pada Bidang Sosial dan Kependudukan (Jumlah Artikel yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Bidang Sosial dan Kependudukan)	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1,660,000,000	65%	1,980,000,000	70%	1,985,000,000	72%	1,980,000,000	75%	2,255,000,000	75%	9,860,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
									0		0		3		4		4		11			
				5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	900,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Police Brief Hasil Riset yang Dimanfaatkan Stakeholder pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1,885,000,000	65%	2,340,000,000	70%	2,340,000,000	72%	2,340,000,000	75%	2,665,000,000	75%	11,570,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

						Jumlah Artikel yang Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Masyarakat	-	0		0	3	4		4		11				
				5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		-	1	200,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	945,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		-	1	15,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	760,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		

				5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Teknologi yang dimanfaatkan <i>Stakeholder</i>	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	NA	60%	1,177,300,000	65%	1,373,750,000	70%	1,387,100,000	72%	1,395,070,000	75%	1,550,070,000	75%	6,883,290,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
						Jumlah Artikel Hasil Pengembangan Teknologi yang Masuk Jurnal Ilmiah			0		0		2		2		2		6				
						Persentase Publikasi Hasil Riset		NA	-		-		100%		100%		100%		100%				
						Persentase Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang Terlindungi dan Kerjasama yang Terdata		NA	-		-		100%		100%		100%		100%				
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Inovasi yang Dihasilkan		NA	-		-		2		2		2		6				
						Jumlah Peta Jalan Produk Unggulan SIDA yang Dihasilkan		NA	-		-		1		1		1		3				
						Jumlah Inovasi Daerah yang Dihasilkan di Provinsi Jambi		NA	0		0		43		60		80		183				
						Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah			0		0		6		6		6		18				
				5.05.02.1.04.01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	2	200,000,000	2	250,000,000	1	253,000,000	1	254,500,000	1	310,000,000	7	1,267,500,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		0	5	400,000,000	5	410,000,000	5	415,000,000	5	416,570,000	5	450,000,000	25	2,091,570,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		0	3	250,000,000	3	289,575,000	3	290,000,000	3	291,500,000	3	300,070,000	15	1,421,145,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan (Laporan)		3	3	227,300,000	3	277,000,000	3	279,100,000	3	280,000,000	3	320,000,000	15	1,383,400,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
				5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0	1	100,000,000	1	147,175,000	1	150,000,000	1	152,500,000	1	170,000,000	5	719,675,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		
					J U M L A H					18,386,930,000		19,844,250,000		21,823,350,000		22,762,870,000		24,245,320,000		107,061,920,000			

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021-2026 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Balitbangda Provinsi Jambi disusun dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Balitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RENSTRA 2021-2026								
1	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase rekomendasi / naskah akademik/ model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lain	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

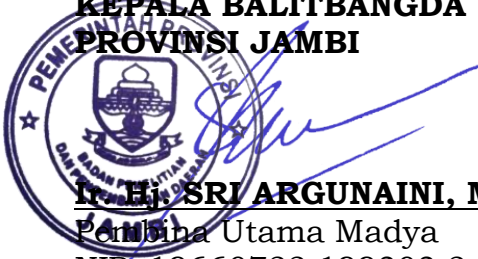
No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai AKIP	B	-	-	69,90	69,95	69,99	69,99
2	Persentase Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	50%	-	-	70%	72%	75%	75%
3	Indeks Inovasi Daerah		-	-	60,00	60,25	60,50	60,50
No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 SESUAI CSF								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Policy Brief yang Dimanfaatkan	50%	60%	65%	70%	72%	75%	75%
2	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	60,00	60,25	60,50	60,50
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	80,00	81,00	82,00	82,00
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB (70,01)	BB (70,25)	BB (70,50)	BB (70,50)

BAB 8

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Keberhasilan P-Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI**

Dr. H. SRI ARGUNAINI, M.Si
Panglima Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004